PENGARUH AUDIT KINERJA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

(Survey Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur)

Oki Wildani

Dr.Ony Widilestaringtyas.SE.,M.Si.

Universitas Komputer Indonesia

Abstrack

The case of mark-up is done by persons officer while on the other hand has not been a follow-up phase of law enforcement officers as well as the lack of accountability towards the public in the process of preparation of the financial statements has not been groomed areas resulting in the financial report that access has yet to be widely publicized to the community.

This research was conducted at the Cianjur District Inspectorates. The purpose of this research is to find out how big the influence of performance audit of accountability and accessibility influence terhadapa financial reports public accountability. The methods used in this research is a method of deskriftif and verifikatif with engineering survey.

Data collection technique used is to carry out fieldwork such as deployment questionnaire, interview, observation and study of librarianship. The test statistic used is test validity and reliability, test the assumptions of classical, calculation of correlation, multiple regression analysis, T-test, F-test by using SPSS 20.0 for windows.

Results of research done in this area of Cianjur Inspectorate showed that partially influence the performance audit as significant effect against public accountability and accessibility of financial statements effect significantly to public accountability.

Keywords: Performance Audit, Financial Statements and accessibility of Public Accountability

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa – masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparasi dan akuntabilitas publik oleh lembaga – lembaga pemerintahan (Mardiasmo, 2002).

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat, Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya

pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik (Achmad Badjuri, 2004).

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik. Dalam upaya menuju pada pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara (Mardiasmo, 2002).

Mekanisme akuntabilitas yang diatur dalam LAKIP hanya ditujukan secara internal kepada atasan saja serta hanya mengukur sejauh mana target yang sudah ditetapkan telah tercapai dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Akuntabilitas publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan para pakar adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja), tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat (Callahan, 2007).

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Ihayul Ulum, 2009).

Perlu disadari di Indonesia saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat intherent sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural. Kelemahan pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah. Kelemahan kedua adalah masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif (Mardiasmo, 2002).

Masalah utama dalam audit kinerja sektor publik adalah menetapkan standar audit atau kriteria yang legitimate. Idealnya pemerintahlah yang menetapkan kriteria kinerja yang dapat di terima umum. Namun kenyataanya auditorlah yang harus mengembangkan dan menetapkan standar atau kriteria kinerja sehingga kompetensi (*knowledge,skill, ability* dan *experience*) auditor menjadi faktor penentu dalam penetapan kriteria atau standar audit yang layak dan jujur untuk menilai kinerja suatu entitas sektor publik (Bushing dan Belk, 2000)

Seperti yang diberitakan sebelumnya oleh Wahju P Djatmiko Ketua Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan dalam media elektronik, " Adanya oknum Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk, diduga telah mark Up anggaran perjalanan dinas, hingga mencapai jutaan rupiah. Kendati demikian, sejauh ini belum ada tindaklanjut dari aparat penegak hukum setempat, meskipun alokasi dana yang diduga di *mark up* yang cenderung merugikan masyarakat luas".

Untuk meminimalisir kecurang – kecurangan seperti diatas, maka dari itu pemerintah perlu melakukan audit, audit yang dilakukan pada sektor publik/ pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda

serta peran yang lebih luas dibandingkan dengan audit sektor swasta (Deddy Supardi & Sherly Wiarty, 2010).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada *stakeholders*. Sebagai konsekuensinya, di berbagai negara, pelaporan eksternal sedang ditansformasikan agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru (Steccolini, 2002).

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi (Siti Aliyah & Aida Nahar 2012).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Siti Aliyah & Aida Nahar 2012).

Dikatakan oleh Yerry F. Dien Sekda Kabupaten Keerom, dalam media online Keeromkab.go.id, “Salah satu permasalahan yang kita hadapi di daerah ini adalah kurangnya proses akuntabilitas terhadap publik dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang belum tertata rapih, dikarenakan SDM pengelolaan keuangan daerah yang sangat minim, terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, hal itupun berdampak pada akses laporan keuangan yang belum dapat dipublikasikan secara luas ke masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan serta penelitian masalah tersebut dengan judul **“ Pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik
2. Seberapa besar Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Kinerja

Menurut Indra Bastian (2007) dalam bukunya Audit Sektor Publik (2007:47) menjelaskan bahwa pengertian audit kinerja adalah :

“Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit”.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan

suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik merupakan Audit yang mengarah pada pemeriksaaan pemerintah, meliputi audit laporan keuangan, audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi dan efisiensi operasi organisasi, audit atas program pemerintah dan BUMN dimana hasil audit itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum dapat dijelaskan indikator audit kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan dan Program pemeriksa
2. Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan)
3. Tahap Penindak Lanjutan

Adapun pengertian indikator Audit Kinerja sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan dan Program pemeriksa
   Tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan.
2. Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan)
   Hasil dari tindakan tindakan pemeriksaan, yang nantinya menghasilkan rekomendasi tentang apa yang harus diperbaiki
3. Tahap Penindak Lanjutan
   Tindak lanjut *(follow up)* oleh audit internal diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas sendiri merupakan hal baru dalam akuntansi sektor publik yang mana membahas tentang aksesibel suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan setahun kerja yang pemerintah laksanakan. Laporan Keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al,* 1990, dalam rohman, 2009).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada beberapa tahapan dalan proses akesibilitas adalah sebagai berikut :

1. Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan

2. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.
3. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan

Adapaun pengertian dari tahapan aksesibilitas laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berkepentingan *(stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah.
2. Kemampuan akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat
3. Kemampuan menyediakan informasi laporan keuangan tepat waktu dan pada saat dibutuhkan oleh para stakeholder

2.1.3 Akuntabilitas Publik

Sebagaimana halnya dengan perusahaan, lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan *(disclosure)* atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu*,* hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dalam konteks organisasi pemerintah, ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan *disclousure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. adapun pengertian akuntabilitas publik sebagai berikut :

Menurut Ihyaul Ulum. MD dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004:40) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

"Suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah baik yang finansial ataupun non finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2004:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu Akuntabilitas vertical dan Akuntabilitas horizontal.

Lebih lanjut jenis-jenis akuntabilitas publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah. Dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Melekat pada setiap lembaga negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Elwood* yang diterjemahkan oleh Mardiasmo (2006:77) bahwa dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi akuntabilitas publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)
   Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
   Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)
   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif dimana jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah untuk mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap sektor publik tersebut. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum dan kebijakan terkait. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas/ fungsi yang diaudit, Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu juga ada beberapa tahapan pendukung agar terjadinya akuntabilitas publik diantaranya tahap perencanaan dan program pemeriksa, tahap pelaporan (laporan hasil pemeriksaan) dan tahap penindak lanjutan.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan

mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan , maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan darah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No.33 Tahun 2004). Ini berarti pemerintah harus membuka akses kepada *steakholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah harus memenuhi keterbukaan tahapan dalam proses akuntabilitas kepada publik yaitu memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan keterbukaan dengan melalui media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan juga ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

2.2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

1. Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:58) menjelaskan bahwa objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tentang suatu hal atau objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sebagai topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data -data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut yaitu Audit Kinerja, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakuakan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Adapun pengertian Desain penelitian menurut Moh.nazir (2003:84) adalah sebagai berikut desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Menurut Sugiyono (2011:30) menjelaskan proses penelitian sebagai berikut:

"Proses penelitian meliputi:

1. Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Landasan Teori
4. Perumusan Hipotesis
5. Pengumpulan data
6. Analisis data
7. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penjelasan tentang desain penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Masalah
   Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.
2. Rumusan Masalah
   Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
   1. Seberapa besar pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik
   2. Seberapa besar pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik
3. Konsep dan Teori yang Relevan
   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (hipotesis). Maka,peneliti membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan melakukan penganalisaan. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis).
4. Pengujian Hipotesis
   Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis.
5. Metode Penelitian
   Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *verifikatif*. Metode *verifikatif* digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan juga menggunakan metode *deskriftif* yang lazim dilaksanakan diantaranya teknik survey.
6. Menyusun Instrumen Penelitian
   Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:
   a. Audit Kinerja dari data kuesioner yang akan diisi oleh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
   b. Aksesibilitas yang diperoleh dari data kuesioner yang akan diisi pegawai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
   c. Akuntabilitas yang diperoleh dari kuesioner yang akan diisi oleh

pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

7. Kesimpulan
   Kesimpulan adalah langkah terakhir berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Menurut Sugiyono (2011:38), mendefinisikan variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Didalam penelitian ini, penulis mengemukakan tiga variabel yang akan diteliti. Adapun variabel yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel *independent* (variabel bebas), yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya,dampaknya atau terpengaruhnya variabel dependent (variabel tidak bebas). Variabel *independent*(variabel X_1) dalam penelitian ini adalah Audit Kinerja, (variabel X_2) Aksesibilitas Laporan Keuangan.
2. Variabel *dependent* (variabel tidak bebas), yaitu variabel yang dipengaruhi atau terkena dampaknya oleh variabel *independent*. Variabel *dependent* (variabel Y) dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik.

Sesuai dengan judul penulis mengenai Pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik, maka konsep variabel yang diteliti antara lain :

1. Audit Kinerja (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) merupakan variabel independen.
2. Akuntabilitas Publik (Y) merupakan variabel dependen.

Untuk memperlancar dalam pengumpulan data dan pengukurannya, maka masing-masing variabel dan subvariabel dalam penelitian ini akan didefinisikan secara rinci untuk dijabarkan ke dalam masing-masing indikator serta skala pengukurannya.

3.2.3 Sumber Data dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yaitu pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai jabatan sebagai auditor.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi
   Menurut **Sugiyono (2008:115)** menjelaskan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka populasi yang digunakan adalah auditor yang berkantor di kantor inspektorat daerah Cianjur.

2. Sampel
   Menurut **Sugiyono (2010:81)** menjelaskan definis sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah sensus dikarenakan populasi sama dengan sampel.

3.2.4
Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Reseach).* Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research*)
   a. Metode pengamatan (*Observasi*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada Inspektorat Cianjur.
   b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
   c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah auditor, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pernyataan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach)*

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.3 Rancangan Analisis

Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Menurut **Sugiyono (2010:31)** analisis kuantitatif adalah sebagai berikut :

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangsn daerah.Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.

3.3.1 Hipotesis

Pengujian hipotesis Menurut Sugiyono (2011:159), yaitu hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu Pengaruh audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik, pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Imam Ghozali,2007).

- Hipotesis

Ho_1 $\beta_1 = \beta_2 = 0$: Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

$Ha_1 \beta_1, \beta_2, \neq 0$: Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

- Kriteria Pengujian

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ (α = 0,05). Menurut Guilford,

2. Pengujian Secara Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan (Dajan,1991:403).

- Hipotesis

Untuk membuktikan apakah audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagi berikut :

Ho : $\beta_1 = 0$: Audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

Ha : $\beta_1 \neq 0$: Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

Ho: $\beta_2 = 0$: Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Ha : $\beta_2 \neq 0$: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Kriteria Pengujian

a) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
b) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Deskriptif

Pada bagian deskriptif akan diberikan gambaran untuk setiap variabel yang diteliti. Penilaian untuk setiap variabel dilakukan dengan membandingkan skor aktual dari tanggapan responden dengan skor ideal. Hasil persentase skor dikategorika berdasarkan rentang skor yang telah ditetapkan pada bab 3.

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur diukur menggunakan 3 indikator (Tahap perencanaan dan Program pemeriksa, Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan Tahap Penindak Lanjutan) dan dioperasionalisasikan menggunakan 10 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Hasil skor penilaian responden untuk ketiga indikator yang membentuk Audit sebesar 59,3% dan termasuk dalam kategori cukup, berikut ini adalah skor setiap indikatornya yang pertama indikator untuk Tahap perencanaan dan Program pemeriksa dengan skor tertinggi sebesar 59,3%, Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) 62,2% dan Tahap Penindak Lanjutan yang terdapat masalah sebesar 56,3%.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Akesesibilitas laporan keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur diukur menggunakan 3 indikator (Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan, Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan Ketersediaan informasi saat dibutuhkan) mengenai Akesesibilitas laporan keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Pada variabel ini terlihat bahwa Indikator Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan mendominasi dengan total persenan skor aktual sebesar 57,8% dengan criteria cukup, yang artinya indikator tersebut memiliki pengaruh yang paling besar sedangkan masalah yang ada pada penelitian ini terdapat pada indikator Ketersediaan informasi saat dibutuhkan sebesar 53,3%.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Publik

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Variabel Akuntabilitas Publik maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Pada variabel ini terlihat bahwa Indikator Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*) mendominasi dengan total persenan skor aktual sebesar 56,6% dengan criteria cukup, sedangkan total dari keseluruhan indikator akuntabilitas publik ini adalah sebesar 53,3%. Hal ini berarti Akuntabilitas Publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.

4.2 Hasil Penelitian Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran objek penelitian berdasarkan data tanggapan responden, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan penelitian berkaitan dengan pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik baik secara parsial maupun secara simultan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data hasil kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil perhitungan skor data variabel X dan Y setelah ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat dilihat pada lampiran.

Bentuk model persamaan regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Publik
X_1 = Audit Kinerja
X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
b_0 = konstanta
bi = koefisien regressi variabel
Xi = Pengaruh faktor lain

Hasil perhitungan perhitungan koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 for windows berdasarkan data penelitian tabel terlampir di lampiran.

Hasil perhitungan persamaan regresi taksiran untuk melihat pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut

$$\hat{Y} = 0{,}055 + 0{,}508\ X_1 + 0{,}469\ X_2$$

Interpretasi dari persamaan linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta bernilai yaitu 0,055. Artinya bila seluruh variabel bebas dianggap konstan, maka tara-rata peningkatan Akuntabilitas Publik sebesar 0,055.
2. Koefisien regresi variabel Audit Kinerja (X_1) bernilai bertanda positif sebesar 0,508 menyatakan bahwa bila variabel

Aksesibilitas Laporan Keuangan dianggap konstan (tetap) maka peningkatan skor penilaian Audit Kinerja terhadap sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan Akuntabilitas Publik sebesar 0,508. Jadi semakin baik penilaian Audit Kinerja maka Akuntabilitas Publik semakin tinggi.

3. Koefisien regresi untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) bertanda positif sebesar 0,469 menyatakan bahwa bila variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dianggap konstan (tetap) maka peningkatan skor penilaian terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan Akuntabilitas Publik sebesar 0,469. Jadi semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan maka Akuntabilitas Publik semakin meningkat.

4.2.1 Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Secara Parsial

Untuk melihat pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{02} : $\beta_1 = 0$ Audit Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Ha_2 : $\beta_1 \neq 0$ Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Audit Kinerja (X_1) diperoleh sebesar 6,438 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Diperoleh nilai t-hitung lebih besar darit-tabel (t_{hitung} = 6,438> t_{tabel} = 2,021). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,043) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik signifikan sangat kecil (0,000) atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Audit Kinerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

4.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Secara Parsial

Untuk melihat pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{03} : $\beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Aksesib terhadap Akuntabilitas Publik

Ha_3 : $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Aksesibilitas Akuntabilitas Publik

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) sebesar 5,282 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000

Diperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari negatif t-tabel (t_{hitung} = 5,282 >t_{tabel} = 2,021). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik signifikan sangat kecil (0,000) atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

4.2.3 Hasil Pengujian Pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik Secara Bersama (Simultan)

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ho_1 $\beta_1 = \beta_2 = 0$: Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

$Ha_1 \beta_1, \beta_2, \neq 0$: Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}. Dari tabel F diperoleh nilai F_{tabel} dengan db_1 = 2 dan db_2 = 43-2-1= 40 sebesar 3,232.

Diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (40,291>3,232). Dengan demikian, hasil uji menunjukkan menolak Ho. Jadi hasil pengujian statistik secara simultan adalah signifikan. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05), yang berarti kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh variabelbebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas signifikan hanya 0,7% atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Audit Kinerja(X_1) terhadap Akuntabilitas Publik(Y)

Hasil perhitungan korelasi audit kinerja dengan akuntabilitas publik yaitu sebesar 50,9 %. Sedangkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada Audit Kinerja sebesar 59,3 % artinya ada gep sebesar 40,7 %. Melihat hal ini bisa diartikan bahwa masih ada masalah sebesar sisa gep yang berasal dari nilai tertinggi rekapitulasi responden yaitu pada dimensi tahap pelaporan dikarenakan hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan petugas hanya menjadi lembaran catatan yang ditumpuk. Sedangkan masalah yang terjadi di dalam penelitian ini terjadinya penyuapan *mark-up* yang dilakukan oleh oknum pegawai sedangkan disisi lain belum adanya tahap tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Hasil rekapitulasi tanggapan responden sebesar 56,3% dengan dimensi tahap penindak lanjutan.

Dalam penelitian ini audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik dibuktikan dari uji t_{hitung}lebih besar dari t_{tabel} yang bernilai 6,438 lebih besar dari 2,021 berarti menerima rumusan hipotesis yang menyatakan, “audit kinerja signifikan terhadap akuntabilitas publik”.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh I Gusti Agung Rai (2008) , bahwa audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu menurut Deddy Supardi dan Sherly Wiarty (2010) menyatakan bahwa apabila Audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.

4.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Publik (Y)

Hasil perhitungan korelasi audit kinerja dengan akuntabilitas publik yaitu sebesar 41,1%. Sedangkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 56,4 % artinya ada gep sebesar 43,5 %. Melihat hal ini bisa diartikan bahwa masih ada masalah sebesar sisa gep yang berasal dari nilai tertinggi rekapitulasi responden yaitu pada dimensi seluruh *stakeholder* memiliki akses terhadap laporan keuangan tetapi sebagian belum bisa mengakses data laporan keuangannya. Masalah yang terjadi di dalam penelitian ini belum tertatanya laporan keuangan yang rapih dikarenakan Sumber Daya Manusia yang sangat minim hal ini berdampak pada akses laporan keuangan yang belum bisa dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hasil rekapitulasi tanggapan responden sebesar 53,3% dengan dimensi tahap ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

Dalam penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik dibuktikan dari uji t_{hitung}lebih besar dari t_{tabel} yang bernilai 5,282 lebih besar dari 2,021 berarti menerima rumusan hipotesis yang menyatakan, “aksesibilitas laporan keuangan signifikan terhadap akuntabilitas publik”.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan I Shande dan Bennet (2004) bahwa akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang mudah dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media surat kabar, majalah,

radio statsiun televise, *website* (internet) dan forum yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu maka Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan bahwa apabila Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh Audit Kinerja dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Audit kinerja yang telah dilaksanakan lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur meskipun belum optimal namun sudah terlaksana dengan cukup baik. Dengan terlaksananya tahapan-tahapan dalam audit kinerja yaitu Tahap perencanaan dan Program pemeriksa, Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan Tahap Penindak Lanjutan diharapkan dapat menunjang akuntabilitas pada pemerintah. Hasil pengujian korelasi menunjukkan Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik sebesar 50,9%.
2. Aksesibilitas Laporan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dengan sudah cukup baiknya akses dari seluruh stakeholder terhadap laporan keuangan, Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan Ketersediaan informasi saat dibutuhkan. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik sebesar 41,1%.

5.2 Saran

1. Audit Kinerja yang dilakukan Inspekrorat Daerah secara umum hasilnya belum optimal terhadap akuntabilitas publik, Inspektorat disarankan agar dapat meningkatkan lagi tahap penidaklanjutannya dan juga akuntabilitas kejujuran dan hukumnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan kecurangan yang terjadi.
2. Aksesibilitas Laporan keuangan secara umum dinilai cukup baik meskipun belum optimal, disarankan agar sumber daya manusia, media akses untuk mendapatkan laporan keuangan dan juga ketersediaan informasi ketika dibutuhkan ditingkatkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta:Penerbit UPP STIM YKPN

Achmad Badjuri. 2004. *Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*.

Andi Supangat. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Boediono. (2001). Ekonomi Makro. Edisi-4. penerbit BPFE, Yogyakarta.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta

Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Boediono. (2001). Ekonomi Makro. Edisi-4. penerbit BPFE, Yogyakarta.

Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Bushong, J. Gregory dan Robert L. Belk. 2000. The Performance Audit. Dalam *Handbook Of Govermental Accounting and finance*. (diedit oleh Nicholas G. Apostolou dan D. Larry Crumbley).

Second Edition. Hlm. 25.1-25.14. Jhon Wiley & Sons. Inc.

Callahan, Cathe, 2007, *Government Measurement, Accounttability and Participation, Newmark*, New Jersey: Rutgers University

Chris Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd, England

Damodar N. Gujarati, 2003 "*Basic Econometrics*" fourth edition McGraw-Hill, New York.

Dista Amalia Arifah "*Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah"* Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol.4, No.3, November 2012

Elly Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. Auditing, Graha Ilmu:Bandung.

Ghozali, Imam, (2007), *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Halim, Abdul dan Theresia. 2005. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadyah Malang.

Koestoer, Raldi Hendro dkk., ed. 2002. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan ,* Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyana, Deddy. 2006*. Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2002. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Nurul Athirah Abd Manaf . 2010. "*The Impact of Performance Audit : The New Zealand Experience".*

Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Riduwan dan Sunarto, H. (2007), Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, Cetakan 1, Alfabeta, Bandung.

Rohman, A. (2009). *Kromatografi Untuk Analisis*. Edisi Ke I. Cetakan I. Graha Ilmu.

Shende, Suresh dan Tony Bennett. *2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountabilityin Public Financial Administration.* UNDESA.

Singgih, Santoso, 2002, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono, 2006, *Teknik Penelitian,* Yogyakarta : Pines.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Jakarta : Bumi Aksara.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP).

VII. LAMPIRAN

Tabel 7.1

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada

Dimensi Audit Kinerja

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tahap perencanaan dan Program pemeriksa	510	860	59,3%	Cukup
2	Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan)	401	645	62,2%	Cukup
3	Tahap Penindak Lanjutan	363	645	56,3%	Cukup
Total		1274	2150	59,3%	Cukup

Tabel 7.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada

Dimensi Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan	621	1075	57,8%	Cukup
2	Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.	248	430	57,7%	Cukup
3	Ketersediaan informasi saat dibutuhkan	344	645	53,3%	Cukup
Total		1213	2150	56,4%	Cukup

Tabel 7.3

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada

Dimensi Akuntabilitas Publik

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)	365	645	56,6%	Cukup
2	Akuntabilitas proses (*process accountability*)	229	430	53,3%	Cukup
3	Akuntabilitas Program (*program accountability*)	356	645	55,2%	Cukup
4	Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)	189	430	44,0%	Cukup
Total		1139	2150	53,0%	Cukup

Tabel 7.4
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,055	,265		,209	,836
	Audit Kinerja (X1)	,508	,079	,592	6,438	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	,469	,089	,486	5,282	,000

Tabel 7.5
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients[a]

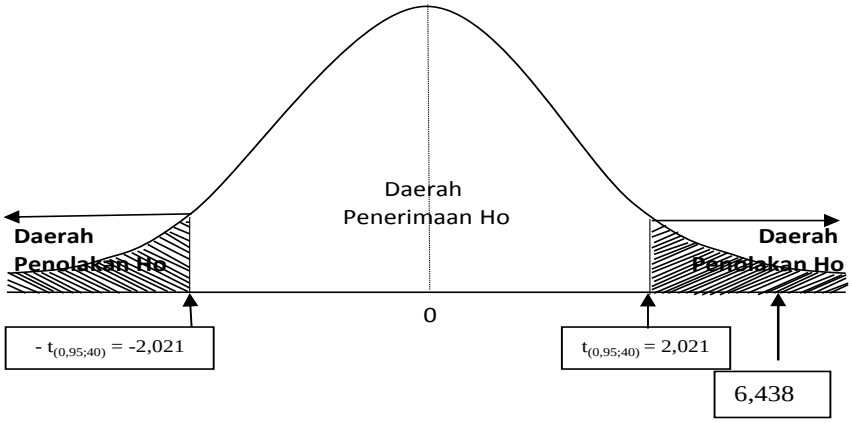
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,055	,265		,209	,836
	Audit Kinerja (X1)	,508	,079	,592	6,438	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	,469	,089	,486	5,282	,000

Tabel 7.6
Hasil Uji Parsial Regresi X terhadap Y

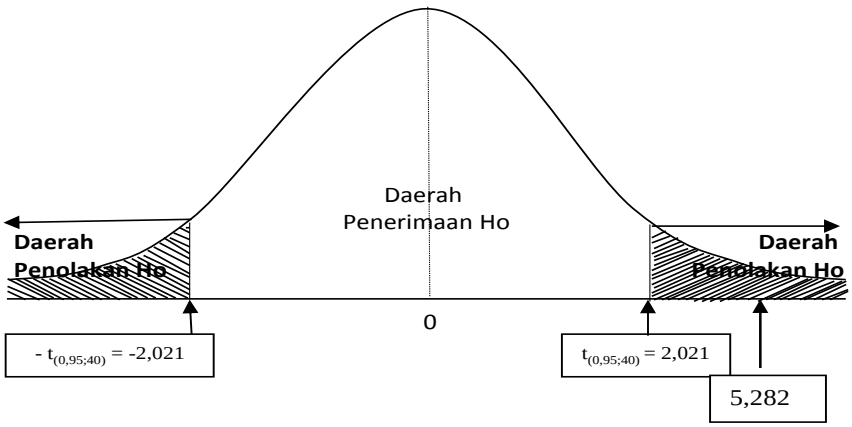
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,055	,265		,209	,836
	Audit Kinerja (X1)	,508	,079	,592	6,438	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	,469	,089	,486	5,282	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik (Y)



Gambar 7.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_1 terhadap Y



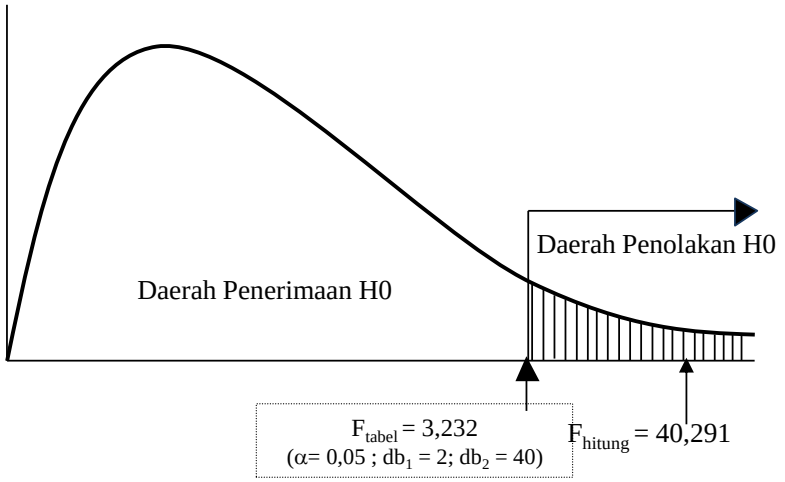
Gambar 7.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_2 terhadap Y

Tabel 7.7
Hasil Uji Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,444	2	3,722	40,291	,000[b]
	Residual	3,695	40	,092		
	Total	11,140	42			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik (Y)
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Audit Kinerja (X1)



Gambar 7.3

Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho Pada Pengujian Simultan